

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah :

Dalam masyarakat modern dewasa ini, mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa. Semua kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya atau dengan kata lain peranan uang dalam perekonomian dapat meningkatkan efisiensi baik bagi produsen, konsumen dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Jumlah uang beredar harus menutupi perekonomian, ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian barter, dimana barang ditukar barang lain secara langsung.

Apabila pemerintah (dalam usahanya untuk mengendalikan situasi makro negara tersebut) menghendaki agar jumlah uang yang beredar meningkat atau menurun maka hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan keputusan pemerintah atau keputusan bank sentral saja, karena selain pemerintah ada dua pelaku lain dalam proses penciptaan uang yang beredar yaitu sektor perbankan dan masyarakat umum. (Boediono, 1993: 85).

Perkembangan uang memang tidak dapat dipungkiri, karena merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian di suatu negara. Kebutuhan akan jumlah uang yang beredar akan

meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara, dalam hal ini peningkatan dari jumlah uang yang beredar guna memenuhi kebutuhan bagi kegiatan ekonomi baik yang sedang atau yang akan dilakukan.

Jumlah uang beredar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Perkembangan uang yang beredar di Indonesia tidak tertutup kemungkinan untuk mengalami perubahan selaras dengan perkembangan yang terjadi di sektor moneter. Proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti (*Reserve Money*), yaitu seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah (Bank Sentral) ditambah saldo rekening koran milik bank-bank pada bank sentral.

Menurut laporan bulanan atau tahunan Bank Indonesia di Indonesia dikenal 3 konsep uang yaitu uang primer atau uang inti atau Mo (*Reserve Money*), uang dalam arti sempit atau M1 (*Narrow Money*) yang terdiri atas uang kartal dan uang giral saja, dan uang dalam arti luas atau M2 yang terdiri atas uang giral, uang kartal dan uang kuasi. Uang primer merupakan kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia, kas Negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), serta sektor swasta di Bank Indonesia.

Ini berarti bahwa uang kartal yang dipegang oleh pemerintah dan simpanan giro yang ada di otoritas moneter tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen dari uang primer. Hal ini disebabkan oleh karena likuiditas yang dimiliki oleh pemerintah terutama berasal dari kegiatan fiskal. Di sisi lain likuiditas masyarakat

diperhitungkan dalam uang primer karena likuiditas tersebut diperoleh melalui transaksi dan merupakan pasiva otoritas meneter. (Insukindro, 1994; 76-78)

Perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia mengalami peningkatan dari lima tahun terakhir. Dapat dilihat perkembangannya dari tahun 1999/2000 sebesar Rp124.633 Miliar menjadi Rp162.186 Miliar dengan prosentase kenaikan sebesar 130.13%, kemudian pada tahun 2000/2001 sebesar Rp162.186 Miliar menjadi Rp177.731 Miliar dengan prosentase kenaikannya sebesar 109.58%, tahun 2001/2002 sebesar Rp177.731 Miliar menjadi Rp191.939 Miliar dengan prosentase kenaikannya sebesar 107.99%, dan pada tahun 2002/2003 sebesar Rp191.939 Miliar menjadi Rp223.799 Miliar dengan prosentase kenaikannya sebesar 116.60%.

Dari tahun ke tahun jumlah uang kartal mempunyai perkembangan yang relatif stabil daripada uang giral. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin mempunyai derajat penggunaan uang yang semakin meningkat. Derajat penggunaan uang yang semakin meningkat akan menimbulkan kenaikan permintaan uang dan kenaikan permintaan uang ini harus dipenuhi oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan uang kartal.

Berikut ini adalah nilai perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia untuk beberapa tahun yang terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA TAHUN 1999-2003
(DALAM MILYAR RUPIAH)

Tahun	Uang Kartal	Uang Giral	% Kenaikan	Total
1999	61.353	81.280	-	142.633
2000	72.371	89.815	130.13%	162.186
2001	77.342	103.368	109.58%	180.710
2002	83.686	114.253	107.99%	197.939
2003	94.542	129.257	116.60%	223.799

Sumber : Bank Indonesia

Kebijakan yang dilakukan untuk mengontrol jumlah uang beredar diantaranya adalah menetapkan *reserve requirement* (cadangan minimum) pada perbankan. Upaya yang ditempuh dapat dilihat dari periode deregulasi moneter terutama pada tanggal 27 Oktober 1988 dan sering disebut dengan Pakto 88. Pada Pakto 88 tersebut *reserve requirement* diturunkan dari 15 % menjadi 2%, selain itu dibidang perbankan dilakukan penciptaan iklim persaingan izin pendirian bank-bank baru dan bank campuran.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA TAHUN 1985-2003”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional terhadap jumlah uang beredar?
2. Bagaimana pengaruh suku bunga deposito terhadap jumlah uang beredar?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan Pakto`88 terhadap jumlah uang beredar ?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional, suku bunga deposito, dan dummy secara bersama terhadap jumlah uang beredar ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari besarnya pendapatan nasional terhadap jumlah uang beredar.
2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari besarnya suku bunga deposito terhadap jumlah uang beredar.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan Pakto`88 terhadap jumlah uang beredar.
4. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari besarnya pendapatan nasional, suku bunga deposito, dan dummy terhadap jumlah uang beredar.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah :

5. Bagi penulis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah.

6. Bagi akademisi

Bagi referensi dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan obyek yang sama

7. Bagi pihak lain

Sebagai bahan masukan bagi pihak lain untuk melanjutkan penelitian pada bidang yang sama tetapi dengan konsep pengukuran yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam tujuh bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Subyek Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran perekonomian, perkembangan jumlah uang beredar, pertumbuhan jumlah uang

beredar, perkembangan pendapatan nasional, dan pertumbuhan tingkat bunga.

BAB III. Kajian Pustaka

Berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV Landasan Teori dan Hipotesa

Dalam bab ini dijelaskan teori yang melandasi penelitian ini seperti: pengertian uang, teori penawaran uang, teori permintaan uang, teori tentang pendapatan nasional, teori tingkat bunga

BAB V Metode Penelitian

Berisi tentang alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB VI Analisa Data dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi data, prosedur pengujian hipotesis, dan hasil pengujian hipotesis.

BAB VII Simpulan dan Implikasi

Bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, saran-saran yang bermanfaat yang dirasa perlu, serta implikasi dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Perekonomian Indonesia Tahun 2003

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dan lebih stabil selama tahun 2003. Hal ini seperti tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, laju inflasi dan suku bunga yang menurun tajam, dan nilai tukar rupiah yang menguat dengan pergerakan yang lebih stabil. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum memadai untuk menyerap tambahan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran masih mengalami kenaikan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih banyaknya permasalahan struktural yang belum terselesaikan, dampak negatif tragedi bom di Bali, dan perekonomian dunia yang masih lesu, terutama pada semester satu 2003.

Aktivitas perdagangan dunia yang masih lesu mengakibatkan pertumbuhan volume ekspor Indonesia, khususnya komoditas nonmigas, relatif rendah. Namun meningkatnya harga komoditas nonmigas dan migas di pasar internasional menjadi penopang utama terjadinya surplus transaksi berjalan selama 2003. Dalam periode yang sama terjadi kenaikan aliran modal negara-negara maju ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Jenis modal asing yang masuk ke Indonesia lebih banyak dalam bentuk investasi portfolio daripada Penanaman Modal Asing (PMA). Namun, peningkatan investasi portfolio tersebut lebih kecil daripada kenaikan pembayaran utang luar

negeri pemerintah dan swasta, sehingga defisit lalu lintas modal mengalami sedikit kenaikan selama 2003. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2003 mencatat surplus yang cukup besar. Surplus NPI tersebut telah mendorong meningkatnya cadangan devisa di Bank Indonesia dalam jumlah yang sangat signifikan menjadi \$36.2 miliar.

Surplus NPI dan jumlah cadangan devisa yang cukup besar tersebut telah memperbaiki keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing dan meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah sehingga memungkinkan berlanjutnya penguatan nilai tukar rupiah selama 2003. Selain itu, penguatan tersebut juga dipengaruhi oleh membaiknya indikator resiko Indonesia, selisih suku bunga riil yang menarik dan pengaruh depresiasi dolar secara global. Secara rata-rata, rupiah menguat 8,71%, menjadi Rp 8.572 per dolar.

Penguatan rupiah menjadi salah satu faktor yang secara fundamental mendorong penurunan laju inflasi selama 2003. Laju inflasi IHK 2003 tercatat 5,06%, menurun tajam dibandingkan 2002 (10,03%) dan lebih rendah daripada sasaran inflasi 2003 ($9\% \pm 1\%$). Penurunan laju inflasi IHK sebenarnya lebih didominasi oleh faktor-faktor nonfundamental, khususnya yang terkait dengan meningkatnya pasokan bahan makanan dan keputusan pemerintah untuk menunda sebagian dari rencana kenaikan harga BBM, tarif telepon, dan tarif listrik (*administered prices*).

Penurunan inflasi memberikan peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga SBI yang kemudian mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan dan kredit. Sepanjang 2003, suku bunga SBI 1 dan 3 bulan masing-masing mengalami penurunan sebesar 462 bps dan 478 bps menjadi 8,31% dan 8,34%. Sejalan dengan itu rata-rata tertimbang suku bunga deposito 1 bulan mengalami penurunan sebesar 619 bps hingga mencapai 6,62% dan suku bunga deposito 3 bulan turun menjadi 8,34%. Sementara itu, suku bunga kredit juga menurun meski dengan laju yang lebih lambat, yaitu hanya sekitar 100-300 bps. Penurunan berbagai suku bunga ini selanjutnya telah menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor riil, baik terhadap kegiatan investasi maupun konsumsi.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,7% pada 2002 menjadi 4,1% pada 2003, sedikit di atas kisaran proyeksi awal 2003. Pada sisi permintaan agregat, seluruh komponen tumbuh positif dengan konsumsi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan. Pertumbuhan investasi sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih pada level yang sangat rendah. Permintaan ekspor juga mengalami perbaikan dibandingkan 2002, tetapi laju pertumbuhannya masih sangat lemah untuk dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dari sisi penawaran agregat, sebagian besar sektor produksi mencatat pertumbuhan yang meningkat. Namun sektor industri pengolahan, yang memiliki efek pengganda dan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, pertumbuhannya

masih tetap lemah. Hal ini menunjukkan struktur penawaran yang kurang mendukung bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kendati meningkat, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu mengangkat pendapatan per kapita kembali ke level sebelum krisis. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga belum dapat menyerap tambahan angkatan kerja. Jumlah pengangguran terbuka diperkirakan naik menjadi 10,1 juta orang atau sekitar 9,8% dari seluruh angkatan kerja.

Kenaikan permintaan tenaga kerja yang relatif terbatas sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Akibatnya, telah terjadi penetrasi oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi ke lowongan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan yang lebih rendah.

Kondisi ekonomi makro yang membaik selama 2003 antara lain didukung oleh pelaksanaan kebijakan ekonomi makro yang senantiasa diarahkan pada upaya pencapaian kestabilan jangka panjang sambil tetap memelihara momentum pemulihan ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal kurang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi telah memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, faktor fundamental dan kebijakan ekonomi mikro khususnya yang terkait dengan kebijakan investasi, industri dan perdagangan belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi.

2.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar Tahun 2003

Sepanjang tahun 2003 posisi jumlah uang beredar, baik dalam arti sempit (M1) maupun dalam arti luas (M2), masih mengalami peningkatan. Ditinjau dari sisi pertumbuhannya M1 menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat sedangkan M2 melambat. Laju pertumbuhan M1 dan M2 pada 2003 masing-masing adalah sebesar 12,4% dan 7,7%, dibandingkan dengan laju pertumbuhan 2002 yang masing-masing tercatat sebesar 9,9% dan 10,1%. Peningkatan laju pertumbuhan M1 sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Adapun perlambatan pertumbuhan M2 bersumber dari beberapa faktor antara lain: (1) Lambatnya penciptaan uang akibat belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan, (2) Berkembangnya alternatif penyimpanan dana bank dalam bentuk reksadana yang menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih baik, sehingga terjadi pengalihan aset masyarakat dari aset perbankan ke aset nonbank, (3) Menurunnya kapitalisasi bunga seiring dengan turunnya suku bunga.

Sementara itu sejalan dengan turunnya laju inflasi dan meningkatnya laju perekonomian, pertumbuhan M1 dan M2 secara riil mengalami peningkatan. Secara rata-rata M1 riil tumbuh positif sebesar 5,5% dari negatif 1,9% pada 2002. Demikian pula dengan M2 riil yang secara rata-rata tumbuh positif sebesar 2,1% dari negatif 1,2% di tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun, posisi M1 tercatat sebesar Rp223,8 triliun atau meningkat sebesar Rp25,9 triliun dibandingkan posisi akhir 2002 sebesar Rp197,9 triliun. Dari

sisi komponen, peningkatan M1 disumbang oleh peningkatan uang kartal sebesar Rp10,8 triliun dan uang giral sebesar Rp15,0 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama M2 mengalami peningkatan sebesar Rp71,8 triliun sehingga menjadi Rp955,7 triliun. Komponen yang memberi kontribusi pada peningkatan M2, selain meningkatnya M1 juga bersumber dari peningkatan uang kuasi sebesar Rp39,9 triliun.

Berdasarkan faktor-faktornya, peningkatan M2 terutama disumbang oleh peningkatan ekspansi kredit dan aktiva luar negeri bersih. Dalam tahun laporan tagihan kepada sektor usaha meningkat Rp.77,5 triliun sedangkan aktiva luar negeri bersih meningkat sebesar Rp. 21,1 triliun. Sementara tagihan bersih kepada pemerintah mengalami kontraksi sebesar Rp. 31,4 triliun sehubungan dengan pelunasan pokok obligasi pemerintah, penjualan sebagian obligasi rekap kepada non-bank, dan *buyback* obligasi pemerintah.

TABEL 2.1
BEBERAPA INDIKATOR MAKRO EKONOMI 2001-2003
(PERSEN)

Rincian	2001	2002	2003
Produk Domestik Bruto	3,5	3,7	4,1
<i>Menurut Pengeluaran</i>			
Konsumsi	3,9	4,7	4,6
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,5	9,2	1,4
Ekspor Barang dan Jasa	2,9	-0,6	4,0
Impor Barang dan Jasa	8,2	-5,0	2,0
<i>Menurut Lapangan Usaha</i>			
Pertanian	1,7	2,0	2,5
Industri Pengolahan	3,1	3,4	3,5
Bangunan	4,4	4,9	6,7
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,7	3,8	3,7
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,4	5,7	6,3
Jasa-jasa	3,1	2,1	3,4
Agregat Moneter			
Pertumbuhan M2			
• Rata-rata	11,74	8,05	6,41
• Akhir Periode	12,99	4,72	8,12
Pertumbuhan M1			
• Rata-rata	19,76	9,85	12,41
• Akhir Periode	9,59	7,99	16,60
Pertumbuhan Uang Primer			
• Rata-rata	17,86	9,22	10,34
• Akhir Periode	15,57	5,98	14,25
Suku Bunga (%)			
SBI (1 bulan)	17,62	12,93	8,31
PUAB (overnight)	15,90	12,42	8,18
Deposito 1 bulan	16,07	12,81	6,62
Kredit Modal Kerja	19,19	18,25	15,07
Kredit Investasi	17,90	17,82	15,68
Inflasi (%)	12,55	10,03	5,06
Neraca Pembayaran			
Transaksi Berjalan / PDB	-4,7	-4,5	-3,8
Nilai Tukar (Rp/USD) Rata-rata	10.256	9.316	8.572

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia, 2003, Bank Indonesia

TABEL 2.2
UANG BEREDAR DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA 2002-2003
(TRILIUN RP)

Rincian	2002	2003	Perubahan 2003/2002
M1	197,9	223,8	25,9
Uang Kartal	83,6	94,5	10,8
Uang Giral	114,3	129,3	15,0
M2	883,9	955,7	71,8
Uang Kuasi	692,0	731,9	39,9
Deposito dalam Rupiah	359,8	350,9	-8,9
Tabungan dalam Rupiah	191,7	241,8	50,1
Simpanan dalam Valas	140,5	139,2	-1,3
Faktor yang Mempengaruhi M2	883,9	955,7	71,8
<i>Aktiva Luar Negeri (Bersih)</i>	250,7	271,8	21,1
Bank Indonesia	212,4	225,9	13,5
Bank Umum	38,3	45,8	7,5
<i>Aktiva Dalam Negeri (Bersih)</i>	633,2	683,9	50,7
Tagihan Bersih Pada Pemerintah	510,4	479,0	-31,4
Bank Indonesia	168,5	173,5	4,8
Bank Umum	341,8	305,7	-36,1
Tagihan Kepada Sektor Usaha	389,3	466,8	77,5
Total Kredit	365,4	437,9	72,5
Kredit Dalam Rupiah	271,9	342,0	70,1
Kredit Dalam Valas	93,6	95,9	2,3
Tagihan Lainnya	23,9	28,9	5,0
Lainnya Bersih	-266,4	-261,9	4,5

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia, 2003, Bank Indonesia

Komponen utama yang berpengaruh pada naiknya uang kuasi adalah tabungan dalam rupiah, sedangkan deposito dalam rupiah serta simpanan dalam

valas memberi kontribusi yang negatif. Tabungan rupiah selama 2003 meningkat sebesar Rp50,1 triliun sehingga pada akhir tahun mencapai Rp241,8 triliun. Sementara itu, deposito dalam rupiah serta simpanan dalam valas masing-masing mencatat nilai sebesar Rp350,9 triliun dan 139,2 triliun di akhir tahun, atau mengalami penurunan sebesar Rp.8,9 triliun dan Rp.1,3 triliun. Penurunan deposito dalam rupiah selama 2003 diperkirakan terkait dengan kecenderungan penurunan suku bunga sehingga masyarakat cenderung untuk menempatkan dananya pada simpanan berjangka waktu pendek yang lebih fleksibel penggunaannya. Selain itu, perkembangan positif dipasar modal juga mendorong masyarakat untuk memindahkan sebagian dananya kepada produk reksadana dan obligasi.

2.3 Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar

Uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang kartal terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku. Uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, dan tabungan dalam rupiah yang sudah jatuh tempo, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.

Perkembangan jumlah uang beredar dalam suatu periode sangat berpengaruh terhadap laju inflasi yang pada akhirnya berdampak pada kondisi perekonomian periode tersebut, semakin besar jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka

tingkat inflasi cenderung semakin tinggi dan kondisi perekonomian semakin memburuk.

Pada tabel 2.3 terlihat bahwa dari tahun 1985 sampai dengan 1997 pertumbuhan jumlah uang yang beredar cukup terkendali, hal ini terlihat dari peningkatan jumlahnya yang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi selama 5 tahun terakhir jumlah uang yang beredar (M1) mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam setiap tahun. Pada tahun 1998, dimana kondisi perekonomian memburuk dan diwarnai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional memicu M1 untuk melonjak tajam. Pada penghujung tahun tersebut M1 mencapai Rp98.197 miliar, jumlah yang sangat meningkat tajam bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Secara lebih jelas, jumlah uang beredar dari tahun ke tahun sampai dengan 2003 disajikan pada tabel 2.3 di bawah ini.

TABEL 2.3
PEREDARAN UANG 1985-2003
(MILIAR RUPIAH)

Akhir periode	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah Total
1985	4.440	5.664	10.104
1986	4.738	6.339	11.077
1987	5.182	6.903	12.085
1988	6.047	7.146	13.192
1989	6.456	11.688	18.144
1990	8.094	12.725	20.819
1991	11.346	16.996	27.342
1992	15.478	18.301	33.779
1993	14.431	22.605	36.805
1994	17.634	25.740	43.374
1995	21.807	35.870	57.677
1996	26.487	47.602	74.089
1997	35.924	51.919	87.843
1998	40.394	57.803	98.197
1999	61.353	81.280	142.633
2000	73.371	89.815	162.186
2001	77.342	103.368	180.710
2002	83.686	114.253	197.939
2003	94.542	129.257	223.799

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia, 2003, Bank Indonesia

Momentum pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter yang efektif yang mulai berjalan pada paruh kedua tahun 1999 menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Strategi diatas memberikan kontribusi pada realisasi pertumbuhan jumlah uang beredar yang masih cukup terkendali sampai dengan tahun 2003. Di penghujung tahun 2003 jumlah uang beredar atau (M1) mencapai angka Rp223.799 miliar. Jumlah tersebut disumbang oleh komponen uang giral sebesar 58% uang kartal sebesar 42%.

2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar

Dari tahun ke tahun, pendapatan nasional dari semua sektor dapat dikatakan meningkat. Struktur perekonomian Indonesia sejak tahun 1991 telah bergeser dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Transformasi ini ditandai oleh kecenderungan mengecilnya peranan sektor pertanian terhadap *Gross Domestic Product*, kecuali pada tahun 1998 dan 1999 dimana peranan sektor pertanian meningkat. Peningkatan tersebut dikarenakan input bahan baku sektor tersebut tidak diperoleh dari impor, melainkan berasal dari dalam negeri, sehingga di saat sektor-sektor lain sangat terpengaruh oleh berfluktuasinya nilai tukar rupiah pada masa krisis perekonomian, sektor ini dapat bertahan dan cenderung meningkat peranannya dalam menyumbang jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia benar-benar terpuruk. Krisis ekonomi yang menghantam menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah sektor keuangan, persewaan, dan komunikasi sebesar negatif 26,6%. Pertumbuhan negatif sektor ini disumbang oleh pertumbuhan subsektor bank sebesar negatif 37,9%, sewa bangunan

negatif 19,9%, lembaga keuangan bukan bank negatif 17,2%, dan jasa perusahaan negatif 16,735%. Sampai tahun 1999, subsektor ini masih mengalami pertumbuhan negatif. Keterpurukan yang begitu dalam di sektor ini karena memang awal krisis ini disebabkan adanya penyaluran kredit perbankan yang tidak selektif dan bias pada kepentingan pemilik bank untuk membesarkan kelompok usahanya dan sektor-sektor yang diproteksi.

Memasuki tahun 2000, kecenderungan membaiknya perekonomian mulai tampak walaupun dengan sinyal yang lemah dan rawan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 ternyata mencapai 4,8%, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 3%-4%. Pertumbuhan ini terjadi pada semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor pengangkutan-komunikasi sebesar 9,4%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 ditopang oleh pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB (pengeluaran investasi) yang meningkat sebesar 17,9% dan permintaan ekspor yang meningkat sebesar 16,1%.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 berkisar antara 3%-4% dan bertumpu pada pengeluaran PMTB dengan catatan perbankan mulai bisa menyalurkan kredit dalam jumlah yang memadai. Sumber pertumbuhan lain adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang naik akibat mulai membaiknya tingkat pendapatan riil pada tahun 2000, apalagi ditambah dengan kepercayaan konsumen yang terus membaik dengan telah terbentuknya pemerintahan baru serta stabilitas politik dan keamanan yang cukup terjaga.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 4,10% dibandingkan tahun 2002 dengan pendapatan perkapita pada tahun 2003 mencapai Rp8,3 juta. Laju pertumbuhan ini digerakan oleh semua komponen PDB penggunaan yaitu konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,02%, konsumsi pemerintah sebesar 9,84%, PMTB sebesar 1,36%, ekspor sebesar 4,04% dan impor tumbuh sebesar 1,96%.

Perkembangan tingkat bunga di Indonesia menunjukkan pergerakan yang searah dengan kecenderungan penurunan suku bunga instrumen moneter. Dari tahun ke tahun perkembangan tingkat bunga khususnya tingkat bunga deposito 3 bulanan mengalami penurunan yang seimbang. Pada tahun 1999, tingkat bunga deposito 3 bulan menunjukkan angka sebesar 25,31 %, kemudian pada tahun 2000 terjadi penurunan sebesar 12,54 %, dan hal ini diikuti dari tahun 2001, 2002, 2003 sebesar masing-masing 17,62 %, 12,12 %, 8,34 %. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan suku bunga deposito adalah meningkatnya likuiditas perbankan, menurunnya suku bunga instrumen moneter.

Penurunan suku bunga juga diikuti oleh suku bunga kredit namun dengan laju penurunan yang lebih lambat. Suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) pada akhir 2003 tercatat sebesar 15,07 %, suku bunga kredit investasi (KI) juga mengalami penurunan , yaitu sebesar 15,68 %, sedangkan suku bunga kredit konsumsi (KK) mengalami penurunan yang paling kecil hanya sebesar 18,69 %.

Seperti yang terjadi pada 2002, lambatnya laju penurunan suku bunga kredit masih disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal perbankan. Faktor internal terutama terkait dengan struktur asset dan perfoma keuangan bank, termasuk didalamnya, tingkat profitabilitas bank, tingkat likuiditas, biaya dana (*Cost of Loanable Funds*), dan rasio kecukupan modal (*Capital adequacy Ratio*). Faktor eksternal terkait dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional, tingkat persaingan perbankan, suku bunga investasi alternatif, serta regulasi sektor perbankan. Sepanjang 2003, secara keseluruhan suku bunga rill SBI 1 dan 3 bulan mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,25 % dan 3,28 % dibanding 2003. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA
2001-2003

Rincian	2001	2002	2003	Perubahan
SBI				
1 bulan	17,62	12,93	8,31	- 4,62
2 bulan	17,63	13,12	8,34	- 4,78
Deposito				
1 bulan				
Counter Rate	13,80	12,23	6,60	- 5,63
Rata tertimbang	16,07	12,81	6,62	- 6,19
3 bulan	17,62	12,12	8,34	- 3,78
6 bulan	16,18	13,79	8,25	- 5,54
12 bulan	15,48	15,28	10,39	- 4,89
Kredit				
Modal kerja	19,19	18,25	15,07	- 3,18
Investasi	17,90	17,82	15,68	- 2,14
Konsumsi	19,85	20,21	18,69	- 1,52

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia, 2003, Bank Indonesia

Pertumbuhan industri keuangan di seluruh dunia adalah salah satu cabang industri yang paling banyak diatur oleh Pemerintah, salah satu alasannya adalah untuk dapat mengontrol jumlah uang yang beredar dalam menjaga stabilitas harga-harga. Berbeda dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, lembaga keuangan dapat menciptakan uang. Surat utang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dapat diterima oleh masyarakat sebagai uang. Semakin maju suatu perekonomian, semakin kecil peranan uang kertas dan uang logam dalam stok jumlah uang beredar dan semakin besar peranan surat utang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sebagai pengganti uang kertas dan logam itu. Surat utang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dapat berupa cek, sertifikat deposito, kartu kredit, dan lain sebagainya.

Untuk membatasi kemampuan lembaga-lembaga keuangan dalam menciptakan uang beredar, melalui kegiatan pemberian kredit dan melakukan investasi, Pemerintah menentukan rasio cadangan minimum (*reserve requirement*) yang berlaku bagi bank dan lembaga keuangan non-bank. Pembatasan akan kemampuan lembaga keuangan non bank dalam menciptakan uang sering pula disebut *gearing ratio*.

Pakto 27 dan Pakdes 20 tahun 1988 adalah bagian dari kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan mobilisasi tabungan nasional, meningkatkan efisiensi lembaga keuangan, dan merasionalisir alokasi sumber ekonomi. Sejak deregulasi 1 juni 1983 itu, peranan pasar semakin menonjol dalam mobilisasi dana dan alokasi perkreditan. Melalui Pakto 27 1988, pemerintah mengharapkan agar

lembaga keuangan dapat semakin aktif dalam proses restrukturalisasi ekonomi nasional, khususnya dalam membelanjakan kegiatan yang menyangkut upaya untuk meningkatkan ekspor non-migas. Selain menambah jumlah bank dan meningkatkan persaingan antara sesama lembaga keuangan, peningkatan efisiensi sistem keuangan didorong oleh Pakto 27 melalui internasionalisasi pasar uang dan modal nasional. Kemudian pemerintah meningkatkan peranan lembaga keuangan dan modal asing, mempermudah ijin bank devisa, meniadakan pagu pinjaman luar negeri perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank.

Sementara itu, Pakdes 20 menambah jenis lembaga keuangan non-bank. Kegiatan usaha lembaga keuangan yang dimaksud tidak berbeda dari kegiatan usaha pembangunan, yaitu memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang serta penyertaan modal badan usaha, kegiatan usaha jenis lembaga keuangan adalah untuk menjadi penjamin emisi serta perantara surat-surat berharga. Dalam Pakdes 20, jenis lembaga keuangan diperluas dengan perusahaan guna usaha (*leasing*), modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Syarat-syarat pendirian lembaga keuangan non bank dalam pakdes 20 jauh lebih ringan dari syarat-syarat pendirian lembaga keuangan non bank sebelumnya.

Pakto 27 dan Pakdes 20 1988 keduanya telah meletakkan dasar yang lebih sehat bagi pengembangan industri keuangan nasional. Tujuan pengaturan preventif adalah untuk mengontrol tingkat resiko yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga-

lembaga keuangan bukan bank guna mengurangi kemungkinan kurang sehatnya industri keuangan itu. Tujuan pengaturan protektif adalah untuk menyediakan jaringan pengaman jika ternyata lembaga keuangan mengalami kesulitan likuiditas yang tidak dapat dihindari dan diatasi sendiri. Jaringan pengaman tersebut dapat berupa proteksi terhadap nasabah ataupun perlindungan terhadap lembaga keuangan.

Bentuk-bentuk tindakan preventif mengenai perbankan, antara lain, adalah berupa ketentuan tentang persyaratan modal, cadangan minimum, pengaturan mengenai tingkat suku bunga, ijin usaha pembukaan bank atau kantor cabang baru (*market entry*). Tindakan proteksi termasuk berbagai bentuk asuransi giro dan deposito untuk melindungi nasabah bank serta fasilitas *lender of last resort* (L.I.R).

Pakto 27 akan tetap menciptakan dualisme dalam industri keuangan nasional, khususnya industri perbankan. Dualisme seperti itu muncul karena adanya perbedaan jenis kredit yang dikenakan ketentuan *legal lending limits* serta jenis yang tidak dikenakan ketentuan tersebut. Kredit yang dikecualikan dari ketentuan *legal lending limits* adalah kredit dengan resiko kecil, terutama kredit program dan kredit yang dijamin oleh pemerintah. Penambahan jumlah bank serta jumlah kantor cabang bank tersebut dimungkinkan karena Pakto 27 membuka kemungkinan bagi pendirian bank baru, mempermudah perijinan menjadi bank devisa, dan mempermudah pembukaan kantor cabang bank. Pakdes 20 juga membuka kembali ijin pendirian lembaga keuangan non bank, menambah jenisnya, serta memperbolehkan pemodal asing untuk ikut menanam modal dalam perusahaan.

Kronologi dan dampak kebijaksanaan deregulasi pada tahun 1988 adalah :

1. Deregulasi 1 Juni 1983

1.1 Pagu kredit dihapus. Persaingan antar bank mulai muncul, baik persaingan “harga” maupun “non harga”. Persaingan tersebut telah sedikit mengurangi *market share* kelompok bank-bank negara.

1.2 Dengan dihapuskannya pagu kredit maka kredit Bank Indonesia diatur secara tidak langsung melalui mekanisme pasar yang lebih transparan. Instrumen tersebut antara lain :

Sertifikat (SBI) mulai dikeluarkan kembali dalam bulan februari 1984.

a. Cadangan devisa untuk melakukan intervensi di Bursa Valuta asing

b. Penetapan pagu pinjaman luar negeri lembaga keuangan serta pagu fasilitas swap

c. Instrumen konvensional lainnya (termasuk jadwal pencairan pembedaan rasio cadangan minimum yang berlaku sebelum dan sesudah Pakto 27, yang harus ditempatkan oleh perbankan dalam bentuk SBI).

1.3 Memaksa bank untuk meningkatkan peranan modal sendiri, dengan cara membatasi pinjaman antar bank. Pagu pinjaman antar bank per 1 Oktober 1984 ditetapkan sebesar 7,5 %. Mulai 7 Agustus 1985, pagu kredit persentase rasio pinjaman antar bank tersebut dinaikkan menjadi 15%.

2. Pakto dan Pakdes 1988

2.1 Membuka *market entry* :

- a. Kesempatan untuk mendirikan bank swasta nasional baru
- b. Kesempatan untuk mendirikan bank campuran
- c. Rasionalisasi untuk mendapatkan ijin sebagai bank devisa
- d. Kemudahan untuk membuka kantor cabang
- e. Perluasan lokasi kantor cabang serta wilayah operasi bank serta bank campuran

2.2 Menghilangkan monopoli akses bank negara pada dana milik sektor negara

2.3 Menurunkan rasio cadangan minimum dari tingkat 15 % menjadi 2 %. Namun untuk waktu yang masih belum ditentukan, cadangan yang menurun itu wajib ditempatkan oleh bank dalam bentuk SBI.

2.4 Meningkatkan keperluan modal sendiri (*capital requirement*). Tercermin dari jumlah modal bank baru (Rp. 10 miliar) dan ketentuan *legal lending limits*.

2.5 *Legal lending limits* sekaligus dimaksudkan untuk pemerataan akses pada kredit bank guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan finansial di tangan golongan masyarakat tertwenju saja.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Untuk membahas lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah Uang Beredar di Indonesia, disini penulis menggunakan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, antara lain :

3.1 Penelitian pernah dilakukan oleh Yuda Handayani dengan judul tulisan “Analisa Kausalitas Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1976 – 1997 “, dan dapat disimpulkan :

- Pengaruh pertumbuhan ekonomi (Independen Variabel) terhadap pertumbuhan jumlah uang beredar (Dependen Variabel) sebagai berikut :
 - Pada t-1 (lag 1) sampai dengan t-2 , F hitung < F tabel yang berarti pertumbuhan jumlah uang beredar dari lag ke2 tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi
 - Pada t-3 (lag 3), F hitung > F tabel yang berarti pertumbuhan jumlah uang beredar pada lag ke 3 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.
 - Pada t-4 (lag 4) sampai dengan t-6, F hitung < F tabel yang berarti pertumbuhan jumlah uang beredar dari lag ke 4 sampai dengan lag ke 6 tidak lagi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.
- Pengaruh jumlah uang beredar (Independen Variabel) terhadap pertumbuhan ekonomi (Dependen Variabel), sebagai berikut :

- Pada t-1 (lag 1) sampai t-4 (lag 4), $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah uang beredar.
- Pada t-5 (lag 5) dan t-6 (lag 6), $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah uang beredar.

3.2 Penelitian tentang masalah jumlah uang beredar pernah dilakukan sebelumnya oleh Mafrukhin dengan judul tulisan “ Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 1985 – 1999 “. Dengan menggunakan model pendekatan Parsial Adjustment Model atau PAM, berdasarkan hasil empiris serta analisis penelitian mengenai jumlah uang beredar, maka dapat disimpulkan :

- Berdasarkan pengujian serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel secara bersama-sama mampu mempengaruhi perubahan variabel dependen, artinya *Gross Domestic Product* (GDP), tingkat bunga, jumlah uang beredar sebelum $M2(-1)$ secara serempak mempunyai pengaruh nyata terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.
- Berdasarkan pengujian secara individual dengan menggunakan uji t terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

- *Gross Domestic Product* (GDP) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar (M2) di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis nilai GDP mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Terbukti koefisien GDP sebesar 0.4040585 mengindikasikan pengaruh yang elastis dari GDP terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Setiap peningkatan 1 % GDP akan meningkatkan jumlah uang beredar (M2) sebesar 0.4040585 %
- Variabel tingkat bunga (R) tidak signifikan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar (M2) di Indonesia.
- Jumlah uang beredar sebelumnya antara M2 (-1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar (M2) di Indonesia saat ini, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesa nilai jumlah uang beredar sebelumnya (M2-1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia terbukti. Nilai koefisien sebesar 0.6800420 mengindikasikan pengaruh yang elastis dari nilai jumlah uang beredar sebelumnya (M2-1) sebesar 1 persen akan menaikkan nilai jumlah uang beredar di Indonesia sebesar 0.680 persen.

3.3 Jurnal Ekonomi dan Industri Edisi I Tahun I November 1993. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farchan. SE yang berjudul "Analisis Hubungan Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Harga di Indonesia 1979.03 - 1991.12"

Penelitian mengindikasikan hubungan fungsional antara jumlah uang beredar dan tingkat harga secara teoritis dan studi empiris muncul mengenai hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga. Bobot penulisan ini terletak pada uji kausalitas dan pendekatan kointegrasi dalam studi empiris. Uji kointegrasi untuk melihat apakah hubungan keseimbangan / hubungan jangka panjang antar variabel sesuai dengan teori, dan uji kointegrasi dilihat apakah model ECM berlaku atau tidak. Data yang digunakan adalah konsep uang beredar (M1) dalam arti sempit, variabel tingkat harga diwakili oleh tingkat harga umum yang dinyatakan dengan indeks harga konsumen.

Alat analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas granger dan Sims, uji kendala linear, dan pendekatan kointegrasi serta ECM. Dan didapat kesimpulannya yaitu:

- Hasil estimasi dengan menggunakan model ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek perubahan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap tingkat harga, sementara itu dalam jangka panjang perubahan jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap perubahan tingkat harga. Besarnya pengaruh jangka panjang tersebut adalah 0.38 yang berarti bahwa kenaikan jumlah uang beredar 1 % menyebabkan kenaikan harga sebesar 0.38%.

- Uji kendala linear : tidak terjadi perbedaan yang nyata antara digunakannya lag 12 dan lag 6. Pengenaan kendala ini justru lebih menguatkan hasil estimasi dari uji kausalitas.
- Kausalitas Granger : terjadi mekanisme umpan balik atau kausalitas dua arah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jumlah uang beredar dan tingkat harga menurut model secara statistic signifikan tidak sama dengan nol.
- Kausalitas Sims : bahwa secara statistik jumlah uang beredar mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat harga. Terjadi kausalitas satu arah dari jumlah uang beredar ke tingkat harga umum.

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1 Landasan Teori

4.1.1 Uang

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum yang digunakan para pelaku ekonomi sebagai alat pembayaran dari transaksi ekonomi yang dilakukan yaitu berupa pembelian barang dan jasa, serta pembayaran utang. Definisi tersebut merupakan definisi fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Definisi tersebut bukan merupakan definisi yang bertalian dengan sifat-sifat kebendaan.

Sedangkan definisi uang yang beredar adalah seluruh “uang kartal” dan “uang giral” yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat (Boediono, 1993; 86).

4.1.2 Fungsi Uang

Fungsi-fungsi uang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Alat tukar menukar**

Fungsi uang sebagai alat penukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang. Karena dengan adanya uang, orang tidak harus menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksikannya tetapi langsung menjual produksinya di pasar dan dengan uang

yang diperolehnya dari hasil penjualan tersebut dibelanjakan untuk pembelian barang yang diinginkannya.

Fungsi ini sangat berguna dalam perekonomian yang sudah maju, maka fungsi ini tidak hanya berlaku dalam perekonomian yang menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang secara langsung. Pada umumnya alat penukar bagi suatu negara itu diciptakan atau dibuat oleh pemerintah dan bank sentral.

- Alat atau satuan pengukur nilai

Satuan pengukur nilai dalam hal ini dimaksudkan sebagai alat yang digunakan untuk membandingkan nilai suatu produk dengan produk yang lain. Misalnya harga sebuah mobil sedan per unit Rp 125.000.000, sedangkan harga sebuah sepeda motor per unit Rp 12.500.000. Dengan menggunakan mata uang rupiah sebagai satuan pengukur nilai produk maka dapat diketahui perbandingan nilai antara mobil sedan dengan sepeda motor, yaitu nilai mobil sedan adalah 10 kali nilai sepeda motor. Dengan demikian, fungsi uang sebagai alat atau satuan pengukur nilai sebenarnya berkaitan dengan nilai tukar antar produk.

- Standar atau ukuran pembayaran masa depan

Uang juga berfungsi sebagai standar pembayaran masa depan atau untuk angsuran utang dan pembayaran. Begitu uang diterima umum sebagai alat penukar ataupun satuan hitung maka secara langsung uang akan bertindak

sebagai unit atau satuan untuk pembayaran angsuran utang ataupun juga untuk menyatakan besarnya utang.

Dengan menggunakan uang dapat dilakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara kontan atau angsuran. Nilai fisik maupun bentuk uang tidak menjadi masalah selama uang tersebut dapat berfungsi sebagai alat penukar, satuan hitung, ataupun sebagai standar pembayaran cicilan utang. Kemampuan uang memenuhi fungsi-fungsi tergantung pada kesediaan masyarakat untuk menerima uang sebagai alat untuk memenuhi tujuan dalam perekonomian.

- Alat penimbun kekayaan atau daya beli

Fungsi uang sebagai alat penukar, satuan hitung, dan alat penimbun kekayaan dikenalkan oleh John Maynard Keynes. Fungsi uang tersebut akan mempengaruhi pemilikan uang tunai oleh seseorang ataupun masyarakat. Seperti diketahui bahwa uang bernilai karena berfungsi sebagai alat penukar, yaitu dengan uang dapat dibeli suatu barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila uang dibelanjakan untuk saat ini, maka uang mempunyai nilai saat ini juga dan apabila uang dibelanjakan untuk masa yang akan datang, maka uang tersebut akan mempunyai nilai juga diwaktu yang akan datang. Dengan demikian, menyimpan uang berarti menimbun kekayaan dalam bentuk tunai. Penyimpanan uang saat ini dimaksudkan untuk mempermudah pertukaran atau transaksi di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Uang dipilih untuk disimpan karena uang bersifat

likuid, yaitu mudah diambil untuk keperluan transaksi atau pembayaran angsuran utang.

- Sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan

Nilai tukar antar mata uang yang disebut dengan kurs mata uang selalu mengalami perubahan. Perubahan kurs mata uang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran mata uang di pasar mata uang asing (Valuta Asing), dan faktor-faktor lainnya seperti kondisi politik. Perubahan kurs mata uang mengakibatkan nilai tukar antar mata uang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah sehingga menarik bagi pelaku ekonomi (pedagang mata uang) untuk memperoleh laba dari selisih harga jual dengan harga beli. Dengan demikian, uang dalam pasar uang bukan hanya sebagai alat transaksi untuk membeli mata uang lain tetapi juga menjadi komoditi yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.

4.1.3 Ciri-ciri uang

- Dapat diterima secara umum dan mudah dikenali (*acceptability dan Cognizability*).

Sesuatu dapat berfungsi sebagai uang apabila sesuatu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk tukar menukar produk yang diterima secara umum dan mudah dikenali. Disamping itu, sesuatu tersebut dapat pula berfungsi sebagai satuan pengukur nilai, standar atau ukuran pembayaran masa

depan, alat penimbun kekayaan atau daya beli, dan sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan yang diterima dan mudah dikenali secara umum.

- Nilai yang stabil (*Stability of Value*)

Nilai uang yang relatif stabil akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi, terutama apabila uang digunakan sebagai alat penimbun kekayaan. Apabila nilai uang sangat berfluktuatif, pelaku akan mencari bentuk alternative kekayaan lain yang nilainya lebih stabil.

- Tidak mudah dipalsukan (*Elasticity of supply*)

Kegiatan perekonomian antar pelaku ekonomi akan menimbulkan permintaan uang sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, kegiatan perekonomian yang semakin besar akan membutuhkan alat transaksi yang semakin banyak pula jumlahnya. Apabila bank sentral sebagai pencipta uang tunggal tidak mampu memenuhi kenaikan permintaan uang akibat kegiatan perekonomian yang semakin besar maka kegiatan perekonomian mengalami kemacetan, dan sebaliknya. Dengan demikian, *elasticity of supply* uang ditunjukkan dari kemampuan Bank Sentral dalam memenuhi permintaan uang dari para pelaku ekonomi.

- Mudah dibawa kemana-mana (*Portability*)

Kelemahan system pembayaran barter antara lain tidak praktisnya barang yang digunakan sebagai alat tukar menukar. Kelemahan itu diatasi dengan

munculnya sistem pembayaran uang, yaitu menggunakan uang sebagai alat tukar menukar karena bersifat praktis mudah dibawa dalam aktifitas keseharian.

- Tidak mudah rusak atau awet (*Durability*)

Sesuatu disebut uang apabila secara fisik awet, tidak cepat rusak, atau robek karena akan mempengaruhi nilai uang dalam fungsinya sebagai alat tukar menukar. Bahkan apabila uang yang sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar menukar karena sudah digantikan dengan uang seri yang lebih baru tetapi secara fisik lebih awet masih bagus akan memiliki nilai yang lebih mahal.

- Mudah dipecah dalam satuan kecil (*Divisibility*)

Antar pelaku ekonomi akan melakukan kegiatan perekonomian dalam berbagai nilai transaksi. Variasi nilai transaksi akan membutuhkan variasi nilai uang, yaitu dari uang bernilai rendah sampai tinggi. Nilai transaksi yang berjumlah cukup besar seharusnya menggunakan nilai uang yang berjumlah besar pula, demikian sebaliknya.

4.1.4 Jenis-jenis Uang

Uang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan bahan (material) terdapat jenis uang logam dan uang kertas. Uang logam tergantung dari berbagai jenis logam yang digunakan antara lain, emas, perak, dan perunggu. Sedangkan untuk uang kertas, berdasarkan perkembangan perekonomian mempunyai diversifikasi yaitu sebagai uang kertas (*currencies*)

dan sebagai uang giral (*deposit money*). Kedua jenis uang kertas ini berbeda dalam hal yang menciptakan. Uang kertas biasa (bagian dari uang kartal) dikeluarkan oleh bank sentral, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank umum.

Uang dapat juga berdasarkan nilainya, yaitu uang bernilai penuh (*full bodied money*) dan uang yang bernilai tidak penuh (*representative full bodied money*).

Full bodied money adalah uang yang memiliki nilai sama antara nilai sebagai barang (Nilai bahan baku) dan nilai sebagai uang. Nilai uang sebagai barang ditunjukkan dengan nilai bahan baku yang digunakan untuk membuat satuan mata uang tersebut per unitnya. Nilai uang sebagai barang disebut juga dengan nilai intrinsik. Nilai uang sebagai uang ditunjukkan dengan nilai uang yang tertulis dalam satuan mata uang tersebut. Nilai uang sebagai uang disebut juga dengan nilai nominal.

Representative full bodied money adalah uang yang mewakili dari sejumlah barang atau logam yang nilai logam sebagai barang (nilai bahan baku) sama dengan nilai sebagai uang. Dalam perkembangan zaman, nilai uang itu biasanya mempunyai nilai yang tidak penuh dalam artian bahwa nilai yang terkandung (intrinsiknya) lebih kecil daripada nilai nominalnya.

4.1.5 Konsep Uang Beredar di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa uang telah merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian suatu Negara. Dalam perekonomian Indonesia saat ini, pada umumnya transaksi yang dilakukan melalui media uang kertas rupiah yang merupakan alat pembayaran yang sah menurut UU No. 13 / 1968. dengan sendirinya nilai berdasar pada baku moneter kepercayaan ini menunjukkan bahwa nilai uang rupiah tidak dijamin oleh seberat logam tertentu (emas biasanya), tetapi ditetapkan oleh pemerintah melalui bank Indonesia. Hal ini karena Bank Indonesia adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah (menurut UU No 13 / 1968).

Menurut bank Indonesia, ada 3 konsep uang beredar yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Uang beredar dalam arti sempit atau *narrow money* (M1)

Uang dalam arti sempit terdiri atas uang kartal ditambah uang giral.

$$M1 = C + DD$$

Dimana :

C = Curency (Uang Kartal)

DD = demand deposit (Uang Giral)

Dalam definisi ini, uang giral (DD) hanya mencakup saldo rekening atau giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank. Sedangkan saldo rekening

Koran milik bank dan pemerintah pada bank lain atau bank sentral tidak dimasukkan dalam definisi uang giral.

2. Uang beredar dalam arti luas atau broad money (M2)

Uang beredar dalam arti luas tersiri dari M1 ditambah uang kuasi. Uang kuasi meliputi semua deposito berjangka (dalam rupiah dan valuta asing) dan tabungan yang ada di neraca system perbankan di Indonesia.

$$M2 = M1 + TD + SD$$

Dimana :

TD = Time Deposit (Deposito berjangka)

SD = Saving Deposit (Sektor tabungan)

3. Uang Inti atau Reserve Money (Mo)

Merupakan kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal yang beredar di luar bank Indonesia dan kas Negara, rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor di bank Indonesia. Besarnya uang inti dan komponen-komponennya dapat diamati pada neraca konsolidasi otoritas moneter di Indonesia

$$Mo = M1 - QM$$

Dimana :

QM = quasi money

Dalam perkembangannya definisi uang beredar Indonesia tidak tertutup kemungkinan untuk mengalami perubahan selaras dengan perkembangan yang

terjadi di sektor moneter. Dengan kata lain barangkali suatu waktu nanti definisi uang di Indonesia tidak saja Mo, M1, dan M2 tetapi dapat juga menjadi M3, M4 dan seterusnya. Hal ini selaras dengan perkembangan sektor keuangan di Indonesia, seperti diperkenalkannya kartu kredit dan kartu-kartu berharga lainnya. Disamping itu adanya produk yang dihasilkan dan dikenalkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank pada taraf tertentu dapat merupakan substansi dari uang rupiah.

4.1.6 Teori Penawaran Uang

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini menyetujui bahwa fungsi ekonomi lembaga perantara keuangan sebenarnya serupa dengan perusahaan pada umumnya. Sebagai produsen, lembaga keuangan bank harus dapat memanfaatkan semua faktor produksi untuk dapat menghasilkan berbagai produksi, misalnya uang kartal yang diproduksi oleh bank sentral dan kredit yang diberikan oleh bank-bank umum. Sebagai dealer atau pialang, mereka berperan dalam pemindahan atau penyaluran dana dari dan ke berbagai kelompok dalam posisi keuangan berbeda.

2. Pendekatan Baru

Pada pendekatan baru, lembaga perantara keuangan dikelompokkan menjadi dua kelompok : tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 memusatkan perhatian dan

analisisnya pada perbankan, kontrak deposito dan kepanikan bank dengan maksud untuk menjelaskan suatu anggapan umum bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang tidak stabil, dengan demikian diperlukan suatu aturan khusus untuk mencegah atau menghindari dari situasi ketidakstabilan tersebut.

Disisi lain tipe 2, memusatkan analisisnya pada peranan lembaga keuangan dalam usaha meminimkan biaya untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi (Insukindro, 1994; 27-29).

4.1.7 Teori Permintaan Uang

Teori permintaan uang tunai yang dibahas dalam bab ini adalah teori permintaan uang menurut teori Klasik, teori Keynes, perkembangan teori Keynes setelah Keynes, teori Kuantitatif modern.

1. Teori permintaan uang menurut Teori Klasik

a. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher

Di dalam setiap transaksi selalu ada penjual dan pembeli. Jumlah uang yang di bayarkan oleh pembeli harus sama dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual. Hal ini berlaku pula untuk seluruh perekonomian, didalam suatu periode tertentu nilai dari barang-barang dan jasa yang dibeli harus sama dengan nilai dari barang-barang yang dijual. Nilai dari barang-barang yang dijual sama dengan volume transaksi (T) dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut (P). Di lain pihak nilai dari barang yang ditransaksikan ini harus pula sama dengan

volume uang yang ada di dalam masyarakat (M) dikalikan berapa kali rata-rata uang bertukar dari tangan satu ke tangan lain, atau rata-rata "perputaran" uang, dalam periode tersebut (VT). $MVT = PT$ adalah suatu identitas, dan pada dirinya bukan merupakan suatu teori moneter. Identitas ini bisa dikembangkan, seperti oleh Fisher, menjadi suatu teori moneter.

$$MV_T = PT$$

VT = sesuatu variabel yang ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada dalam suatu masyarakat, dan dalam jangka pendek bias dianggap konstan (Transaction velocity of circulation)

T = Volume transaksi, dalam suatu periode tertentu ditentukan oleh tingkat output masyarakat. Identitas tersebut kemudian diberi "nyawa" dengan mentransformasikan ke dalam bentuk :

$$M_d = \frac{1}{V_T} PT$$

Permintaan (atau kebutuhan) akan uang dari masyarakat adalah suatu proporsi tertentu. permintaan (atau kebutuhan) akan uang dari masyarakat adalah suatu proporsi tertentu. $\frac{1}{\bar{V}_T}$ dari nilai transaksi ($P\bar{T}$).

(Tanda "-" menunjukkan variabel-variabel konstan jangka pendek).
Persamaan dibawah ini, bersama dengan persamaan yang menunjukkan posisi equilibrium disektor moneter.

$$M_d = M_s$$

dimana M_s = supply uang yang beredar (yang dianggap ditentukan oleh pemerintah) menghasilkan :

$$M_s = \frac{1}{V_T} PT$$

Dalam jangka pendek tingkat harga umum (P) berubah secara proporsional dengan perubahan uang yang diedarkan oleh pemerintah. Dalam teori ini T ditentukan oleh tingkat output equilibrium masyarakat. Menurut Fisher dan para ahli ekonomi Klasik adalah selalu pada posisi " *Full Employment*" (Hukum Say atau Say's Law).

Variabel yang belum diterangkan adalah *Transaction Velocity of Circulation*. Fisher mengatakan bahwa permintaan akan uang timbul dari penggunaan uang dalam proses transaksi. Setiap perekonomian dalam setiap tahap pertumbuhannya mempunyai suatu sistem kelembagaan yang menentukan sifat dari proses transaksi. Besar kecilnya nilai V_t ditentukan oleh sifat proses transaksi yang berlaku di masyarakat dalam suatu periode. Sistem kelembagaan ini mencakup faktor-faktor misalnya tingkat "monetisasi" sektor-sektor ekonomi (masyarakat agraris tradisional memerlukan uang yang lebih kecil untuk setiap volume transaksi daripada masyarakat industri).

Pada hakekatnya yang perlu dicatat adalah bahwa faktor-faktor kelembagaan seperti ini biasanya berubah secara gradual dan dalam jangka

panjang. Dalam jangka pendek kebutuhan (atau permintaan) akan uang relatif terhadap volume transaksi bisa dianggap konstan.

Implikasi dari teori Fisher ini adalah sebagai berikut :

1. Permintaan akan uang di dalam suatu masyarakat merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan pula dari tingkat output masyarakat.
2. Dari segi kebijaksanaan ekonomi makro, teori moneter ini mempunyai implikasi yang penting, yaitu bahwa tingkat pendapatan nasional equilibrium atau tingkat harga umum bila tingkat full employment sudah tercapai, tidak dipengaruhi oleh kebijaksanaan fiskal.

b. Teori permintaan uang menurut Teori Cambridge

Seperti halnya dengan teori Fisher dan teori Klasik lainnya, berpokok pangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar umum (*means of exchange*) melihat kebutuhan uang (atau "permintaan akan uang") dari masyarakat sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi. Perbedaan utama antara teori Cambridge dan teori Fisher, terletak pada tekanan dalam teori "permintaan akan uang" Cambridge pada perilaku individu dalam mengalokasikan kekayaannya antara berbagai kemungkinan bentuk kekayaan, yang salah satunya bisa berbentuk "uang". Teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegangan kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang (berbeda dengan

bentuk kekayaan lain) mempunyai sifat likuid sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan dengan barang yang lain. Teori ini lebih menekankan faktor-faktor perilaku (pertimbangan untung rugi) yang menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Teoritisi Cambridge mengatakan bahwa permintaan akan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan warga masyarakat, dan harapan (*expectation*) dari para warga masyarakat mengenai masa mendatang.

Jadi dalam jangka pendek, teoritisi Cambridge menganggap bahwa jumlah kekayaan, volume transaksi, dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang proporsional-konstan satu sama lainnya dan akhirnya mereka merumuskan teori uang dalam bentuk yang tidak jauh beda dengan teori Fisher.

Teori Cambridge menganggap bahwa, ceteris paribus permintaan akan uang adalah proporsional dengan tingkat pendapatan nasional.

$$M_d = k P \dot{Y}$$

dimana Y adalah pendapatan nasional

Supply akan uang (M_s) dianggap ditentukan oleh pemerintah. Dalam posisi keseimbangan maka:

$$M_s = M_d$$

sehingga

$$M_s = k P \dot{Y}$$

atau

$$P = \frac{1}{k} M_s \cdot Y$$

Jadi ceteris paribus tingkat harga umum (P) berubah secara proporsional dengan perubahan uang yang beredar, kecuali tambahan ceteris paribus (yang berarti faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan nasional riil, tingkat bunga dan harapan adalah konstan).

2. Teori Permintaan Uang Menurut John Maynard Keynes

Teori Permintaan uang tunai John Maynard Keynes menjelaskan bahwa masyarakat melakukan permintaan uang tunai untuk tujuan memenuhi kebutuhannya (Transaksi, Berjaga-jaga, dan spekulasi). Permintaan uang tunai untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat sedang permintaan uang tunai untuk tujuan spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga.

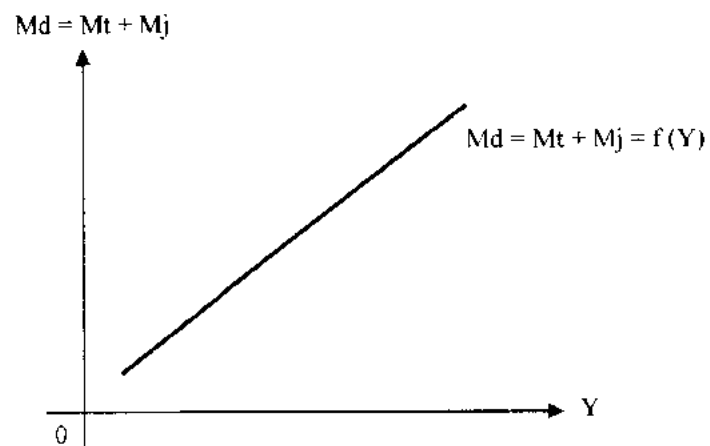
a. Permintaan Uang untuk Transaksi dan Berjaga-jaga

Permintaan uang tunai untuk tujuan transaksi menunjukkan jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan membiayai transaksi/ pengeluaran yang sifatnya rutin. Misalnya membayar uang sewa rumah yang per periode waktu tertentu membayar dalam jumlah yang tetap dan rutin. Permintaan uang tunai untuk tujuan berjaga-jaga menunjukkan jumlah uang tunai yang diminta untuk

membayai transaksi/pengeluaran yang sifatnya bukan rutin dan bukan yang bersifat spekulatif.

Jumlah uang tunai yang diminta untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan. Artinya semakin besar tingkat pendapatan semakin besar pula jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, dan sebaliknya. Secara grafis, teori permintaan uang tunai tujuan transaksi dan berjaga-jaga menurut teori John Maynard Keynes digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 4.1
GRAFIK PERMINTAAN UANG MENURUT KEYNES UNTUK
TUJUAN TRANSAKSI DAN BERJAGA-JAGA

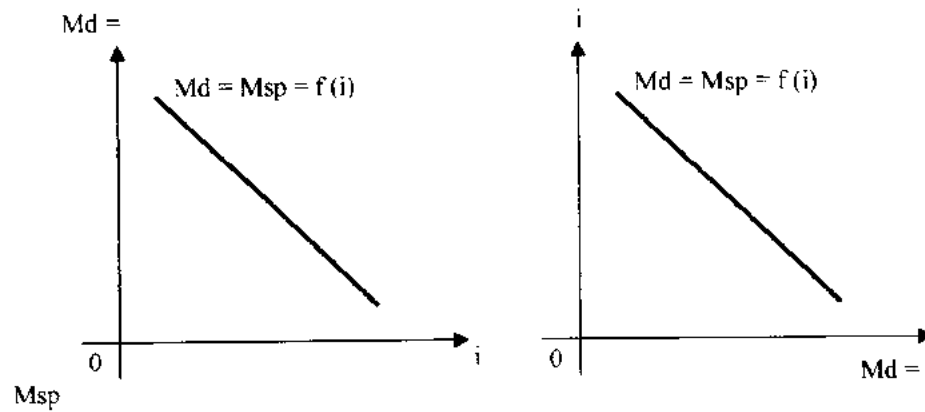


b. Permintaan Uang Tunai Untuk Tujuan Spekulasi

Permintaan uang tunai untuk tujuan spekulasi menunjukkan jumlah uang tunai untuk tujuan membiayai transaksi atau pengeluaran yang sifatnya spekulatif. Jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan spekulasi dipengaruhi secara negatif oleh tingkat bunga. Artinya semakin tinggi tingkat bunga semakin sedikit jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan spekulasi, dan sebaliknya. Hubungan tidak searah antara tingkat bunga dengan jumlah uang tunai untuk tujuan spekulasi karena adanya *opportunity cost of holding money* atau ongkos memegang uang tunai.

Ongkos memegang uang tunai adalah ongkos yang harus dibayar seseorang yang menyimpan uang tunai bukan di lembaga keuangan, misalnya menyimpan uang tunai di rumah. Orang tersebut akan menanggung ongkos sebesar bunga yang tidak diperoleh seandainya menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Semakin besar bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan semakin besar pula ongkos memegang uang tunai, sehingga akan mengurangi jumlah uang tunai yang disimpan di rumah, demikian pula sebaliknya. Jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan spekulasi di simbolkan dengan M_s atau L_2 . secara grafis, teori permintaan uang tunai untuk tujuan spekulasi menurut teori John Maynard Keynes digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 4.2
GRAFIK PERMINTAAN UANG MENURUT KEYNES UNTUK
TUJUAN SPEKULASI



Secara matematis, teori permintaan uang tunai menurut John Maynard

Keynes secara keseluruhan adalah :

$$Md = Mdtb + Msp = F (Y, i)$$

Dimana :

Md = jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi

$Mdtb$ = jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, atau dapat ditulis dengan symbol lainnya, yaitu $L1$

Msp = jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan spekulasi, atau dapat ditulis dengan symbol lain, yaitu $L2$

Y – tingkat pendapatan

I = tingkat bunga

Apabila dihubungkan dengan penjelasan bahwa tingkat pendapatan naik maka jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga akan meningkat dan sebaliknya, maka hubungan antara tingkat pendapatan dan jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga searah.

Apabila dihubungkan dengan penjelasan bahwa tingkat bunga naik maka jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan spekulasi akan menurun dan sebaliknya, maka hubungan antara tingkat bunga dan jumlah permintaan untuk tujuan spekulasi tidak searah. Secara matematis, hubungan yang searah ditunjukkan dengan slope fungsi yang bertanda positif dan hubungan yang tidak searah ditunjukkan dengan slope yang bertanda negatif.

Teori moneter Keynes ini mempunyai implikasi-implikasi sebagai berikut:

1. Teori ini mempunyai ciri dasar bahwa perubahan volume uang yang beredar tidak mempengaruhi tingkat maupun komposisi output dalam masyarakat. Volume uang yang beredar hanya mempengaruhi tingkat harga umum (P), sedangkan tingkat dan komposisi output dalam masyarakat dipengaruhi oleh harga relatif dan faktor-faktor non moneter lainnya
2. Teori permintaan akan uang dari Keynes mempunyai implikasi bahwa fungsi permintaan akan uang (liquidity Preference) adalah fungsi yang tidak stabil, dalam arti bahwa fungsi ini bisa bergeser dan berubahposisi dengan cepat dari waktu ke waktu.

3. Teori permintaan uang setelah Keynes : Baumol-Tobin

Menurut Baumol dan Tobin mencapai kesimpulan-kesimpulan yang serupa mengenai mengenai permintaan transaksi akan uang. Baumol melihat bahwa kebutuhan akan uang dari seseorang (baik sebuah rumah tangga maupun sebuah perusahaan) untuk tujuan transaksi pada hakekatnya adalah sama dengan kebutuhan "stok" (inventory) untuk suatu barang.

Model dari Baumol bertitik tolak dari anggapan bahwa seseorang menerima pendapatan sejumlah tertentu secara reguler setiap waktu. Dianggap bahwa selalu digunakan untuk membelanjakan atau menggunakan penghasilan tersebut untuk tujuan transaksi sejumlah tertentu setiap harinya. Dengan kata lain, kebutuhan dana (uang tunai) per satuan waktu adalah konstan.

Biaya total (C) dari pemegangan "stok" ini adalah:

$$C = b \frac{T}{K} + R \frac{K}{2}$$

kemudian fungsi C diturunkan terhadap K dan menyamakan dengan nol.

$$\frac{\partial C}{\partial K} = -\frac{bT}{K^2} + \frac{R}{2} = 0$$

Jadi permintaan akan uang untuk transaksi adalah:

$$\frac{M_d}{P} = \frac{K}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2bT}{R}}$$

Fungsi permintaan akan uang tunai untuk transaksi seperti persamaan diatas jelas berbeda dengan fungsi permintaan akan uang untuk transaksi yang

asli dari Keynes, yaitu kYP (bentuk proporsional terhadap pendapatan). Dan perbedaan ini mempunyai satu implikasi penting, yaitu bahwa masyarakat menentukan permintaannya akan uang tunai untuk tujuan transaksi seperti apa yang digambarkan oleh Baumol, maka fungsi permintaannya menunjukkan adanya *economics of scale* dari penggunaan uang. Adanya "*economics of scale*" ini mempunyai 2 konsekuensi lanjut yang perlu dicatat:

1. Dari segi ekonomi makro, hal ini berarti bahwa permintaan akan uang untuk transaksi dari masyarakat secara keseluruhan ternyata tidak hanya tergantung pada pendapatan nasional, tetapi juga pada "distribusi pendapatan" antar warga masyarakat.

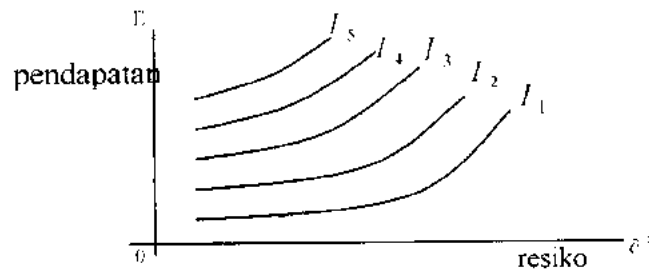
2. Dari segi kebijaksanaan moneter, adanya *economics of scale* dalam penggunaan uang untuk transaksi mempunyai implikasi bahwa kebijaksanaan moneter relatif menjadi lebih efektif daripada seandainya tidak ada *economics of scale*.

Permintaan uang untuk spekulasi (Tobin) bertitik tolak pada anggapan bahwa seseorang akan mendapatkan kepuasan (*utility*) yang lebih besar semakin besar nilai kekayaannya atau penghasilannya, tetapi akan mendapatkan kepuasan negatif (*dis-utility*) bila menghadapi "resiko" yang semakin besar yang bersangkutan dengan kekayaannya. Tobin menganggap bahwa seseorang bisa menilai secara konsisten dengan berbagai nilai kekayaan atau pendapatan. Tobin menganggap bahwa untuk kekayaan atau pendapatan pun berlaku hukum

marginal utility yang menurun (law of diminishing marginal utility), yaitu semakin besar kekayaan atau pendapatan semakin kecil tambahan utility (marginal utility) yang diperoleh dari setiap rupiah kenaikan kekayaan atau pendapatan tersebut.

Dari asumsi tersebut dapat diperoleh "kurva indifference" atau *indifference curve* seperti gambar berikut ini.

**GRAFIK 4.3
INDIFFERENCE CURVE**



Teori permintaan uang untuk motif spekulasi dari Tobin merupakan satu langkah maju terutama dalam memantapkan landasan teori Keynes pada tingkat "mikro". Perilaku "spekulatif" seorang konsumen (pemilik kekayaan) dianalisa dengan cara yang sama dengan perilaku yang dikenal dalam teori mikro, yaitu menggunakan prinsip maksimasi "utility".

Perlu diingat pula bahwa metode analisa tobin yang dikemukakan disini tidaklah terbatas untuk kasus yang menganggap bahwa kekayaan hanya bisa dipegang dalam bentuk uang tunai atau obligasi, tapi bisa diperluas dan mencakup bentuk-bentuk aktiva lainnya.

4. Teori Kuantitas Modern

Pelopop pembaharuan Teori Kuantitas sesudah Keynes adalah Milton Friedman. Friedman tidak bertitik tolak dari pembahasan yang mendalam mengenai "motif-motif memegang uang". Secara umum menganggap bahwa orang mau memegang uang karena uang adalah salah satu bentuk aktiva (aset) yang memberikan manfaat karena merupakan sumber daya beli yang likuid (*readily available of purchasing power*).

Teori permintaan akan uang Friedman menganggap bahwa "pemilik kekayaan" memutuskan aktiva-aktiva (termasuk uang tunai) dan berapa yang akan dipegang atas dasar perbandingan manfaat (penghasilan dalam bentuk uang atau dalam bentuk *in natura* ataupun "utility").

Pengertian "kekayaan" dari Friedman mempunyai ciri khas, yaitu bahwa yang dimasukkan dalam definisi "kekayaan" tidak hanya aktiva-aktiva yang berbentuk uang atau yang bisa diubah menjadi uang, tetapi termasuk juga nilai (tepatnya, "nilai sekarang" atau *present value*) dari aliran penghasilan di tahun-tahun mendatang dari tenaga kerjanya.

Konsep "kekayaan" dari Friedman ini merupakan suatu inovasi dalam teori ekonomi mengenai kapital, sekaligus merupakan jembatan antara teori permintaan biasa (untuk barang dan jasa) dengan "teori kapital".

Pengertian yang kedua yang penting bagi teori moneter Friedman adalah konsep "manfaat". Manfaat atau *return* dari setiap bentuk aktiva merupakan

faktor pertimbangan bagi pemilik kekayaan untuk memutuskan berapa jumlah dari masing-masing bentuk aktiva yang akan dipegang.

Friedman menganggap bahwa pemilik kekayaan bisa memilih lima bentuk kekayaan untuk dipegang :

- a. Uang tunai (M)
- b. Obligasi (B)
- c. Saham-saham atau equitis(E)
- d. barang-garang fisik bukan manusiawi(G)
- e. Kekayaan manusiawi atau human kapital(H)

Return atau manfaat untuk aktiva yang dipegang dalam bentuk uang tunai bisa berupa uang pula, yaitu misalnya bila uang disimpan dalam bentuk rekening giro. Return untuk aktiva yang dipegang dalam bentuk obligasi adalah "*interest income*" dan "*capital gain*".

Interest income adalah jumlah tetap tertentu yang dicantumkan dalam obligasi sebagai imbalan yang akan diterima oleh pemegang obligasi setiap periode tertentu. dan ini ditentukan oleh tingkat bunga yang berlaku (R). *Capital gain* adalah keuntungan (atau kerugian), kalau capital gain ini negatif yang bersumber dari naik-turunnya harga pasar dari obligasi. Apabila tingkat bunga (R) naik, maka harga obligasi turun, apabila tingkat bunga turun maka obligasi naik. Jadi besarnya *capital gain* ditentukan oleh prosentase perubahan tingkat bunga dari waktu ke waktu, atau oleh (dR / dt) . "*return*" total dari pemegangan

obligasi adalah $R - \frac{dR/dt}{R}$, perhatikan tanda minus pada $\frac{dR/dt}{R}$, karena apabila perubahan R positif, berarti ada capital gain yang negatif dan sebaliknya bila perubahan R tersebut negatif berarti ada capital gain yang positif. *return* untuk saham atau *equities*, diasumsikan bahwa *return* (dalam satuan uang atau in monetary terms) untuk *equities* (E) dipengaruhi pula oleh perubahan tingkat bunga. *return* untuk *equities* :

$$R - \frac{dR/dt}{R} + \frac{dP/dt}{P}$$

Untuk human kapital (H), yaitu aktiva manusiawi yang secara ekonomis adalah nilai sekarang (present value) dari aliran pendapatan yang akan dihasilkan di waktu-waktu mendatang oleh tenaga kerja seseorang, Friedman menyatakan bahwa dalam prakteknya sulit untuk diukur dalam empiris. Ini disebabkan oleh karena aliran pendapatan dari tenaga kerja di masa mendatang tidak mempunyai "harga pasar". Dikatakan bahwa semakin besar aktiva H yang dipegang relatif terhadap aktiva-aktiva lain, semakin besar permintaan akan uang tunai. Faktor terakhir yang dianggap menentukan permintaan dari seseorang adalah preferensi atau selera orang tersebut (u). Faktor ini adalah faktor subyektif yang berbeda antara satu orang dengan orang lain.

Maka permintaan akan uang tunai dari seseorang individu adalah:

$$M = f(W, P, R, R - \frac{dR/dt}{R}, R - \frac{dR/dt}{R} + \frac{dP/dt}{P}, \frac{dP/dt}{P}, K, u)$$

Berapa jumlah aktiva yang dipegang dalam bentuk uang tunai (M) ditentukan oleh:

1. Besarnya kekayaan total yang dimilikinya (W), semakin besar W semakin banyak M yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut.
2. Perbandingan antara "return" dari berbagai macam aktiva yang bisa dipegang. Semakin tinggi tingkat harga (P), semakin besar M nominal yang diminta, karena kebutuhan M riil tertentu semakin besar kebutuhan M nominal.
3. Rasio antara kekayaan manusiawi dan kekayaan bukan manusiawi (K). Semakin besar K , yaitu semakin besar human kapital relatif terhadap non-human kapital, semakin besar M yang diminta.
4. Selera (u).

Arti pentingnya teoritis Friedman adalah terletak pada usaha untuk melakukan integrasi konseptual antara "kekayaan" (*wealth*) dan "pendapatan" (*income*) sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku pemilik kekayaan.

Sehingga implikasi dari teoritis Friedman sebetulnya bukan terletak pada perumusannya mengenai bentuk fungsi permintaan akan uang, tetapi pada sifat dan pengertian dari variabel "pendapatan" yang relevan bagi analisa moneter, yaitu sesuatu yang dihubungkan dengan aliran penghasilan yang diharapkan dari kekayaan yang dipegang dan bukan pendapatan yang diukur dengan statistik pendapatan nasional.

4.1.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar

Dari beberapa teori jumlah uang beredar yang dapat disimpulkan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi jumlah uang beredar di suatu negara, baik itu variabel ekonomi maupun non ekonomi. Dalam penelitian ini variabel variabel yang digunakan hanyalah variabel ekonomi yang dianggap berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Adapun variabel tersebut adalah :

1. Kebijakan Pakto 1988 (*Reserve Requirement*)

Reserve Requirement (cadangan minimum) adalah peraturan Bank Sentral yang menuntut bank-bank untuk memiliki rasio deposito–cadangan minimum.

Cadangan minimum merupakan salah satu instrumen atau alat kebijakan moneter yang dipakai oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Cadangan minimum tersebut harus disimpan, baik dalam bentuk kas pada bank yang bersangkutan maupun disimpan dalam rekening giro pada bank sentral (setiap bank diwajibkan memiliki rekening giro pada bank sentral). Selanjutnya, bank boleh menyalurkan dana tabungan yang dihipunnya tersebut setelah menahan sejumlah likuiditas wajib. Dana yang dapat dipinjamkan setelah dikurangi likuiditas wajib disebut *loanable funds*.

Dalam hal ini, bank sentral dan pemerintah yang mempunyai pengaruh paling besar, karena memegang monopoli penciptaan uang kartal. Bank-bank hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang oleh bank tersebut. Tanpa uang kartal maka tidak ada uang giral. Oleh sebab itu maka uang kartal ciptaan bank sentral itu sering disebut sebagai uang inti (*base money atau high powered money*). Namun uang inti tidak hanya terdiri dari uang kartal, tetapi juga terdiri dari hutang-hutang moneter dari bank sentral kepada masyarakat dan bank-bank, misalnya saldo-saldo rekening koran bank-bank pada bank sentral.

a. Jumlah total dari reserve bank-bank komersil (R) terdiri dari :

RRm = required reserves of member banks

ERm = excess reserves of member banks

VCn = vaults cash of non-member banks

$$R = RRm + ERm + VCn$$

$$\text{Dan : } RRm = R^d + R^t$$

Dimana :

R^d = required reserves behind demand deposits at member

R^t = required reserves behind time deposits at member banks

b. Secara alternative, jumlah total dari reserve bank-bank komersil (R) itu dapat dinyatakan sebagai suatu proporsi (r) dari total bank deposits :

$$R = r(D+T+G)$$

Dimana :

D = private demand deposits

T = time deposits

G = US Government (Treasury) deposits at commercial banks

R ratio didefinisikan sebagai suatu bobot rata-rata reserve ratio atas seluruh deposits bank, tapi dihitung secara langsung dengan membagi total reserves dengan total deposits.

- c. Jumlah uang beredar terdiri dari uang inti (base money atau reserve money) dan uang yang diciptakan oleh bank-bank. Uang inti tidak identik dengan uang kartal yang beredar, sebab uang inti mencakup pula uang kartal yang tidak beredar tetapi dipegang oleh bank-bank, termasuk pula rekening-rekening giro dari anggota masyarakat dan bank-bank yang disimpan pada bank sentral. Biasanya anggota masyarakat umum tidak banyak menyimpan uangnya sebagai rekening giro pada bank sentral. Jadi rekening giro dari masyarakat umum pada bank sentral bias diabaikan. Uang kartal yang dipegang oleh bank-bank, ditambah saldo-saldo rekening giro dari bank-bank umum pada bank sentral adalah uang reserve (uang inti) yang merupakan benih bagi uang yang diciptakan oleh bank, sehingga :

$$B = R + C$$

Dimana :

B = uang inti

R = reserve bank

C = uang kartal yang dipegang oleh masyarakat umum di luar bank-bank

- d. Uang kartal yang dipegang oleh masyarakat umum di luar bank-bank, atau Currency (C) dapat diekspresikan sebagai suatu proporsi (k) dari demand deposits (D), yakni :

$$C = k D \quad \text{atau} \quad k = \frac{C}{D}$$

Perubahan dalam tingkat "k-ratio" sepanjang waktu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti : tingkat income, penggunaan kartu kredit, dan ketidakpastian tentang stabilitas ekonomi umum.

- e. Time deposits (T) dapat diekspresikan sebagai suatu proporsi (t) dari demand deposits (D), yaitu :

$$T = t D \quad \text{atau} \quad t = \frac{T}{D}$$

- f. Government deposits (G) dapat diekspresikan sebagai suatu proporsi (g) dari private demand deposits (D), yaitu :

$$G = g D \quad \text{atau} \quad g = \frac{G}{D}$$

Jumlah dari G dalam bank-bank komersil ditentukan oleh aliran penerimaan pemerintah relatif terhadap pengeluaran pemerintah, serta oleh kebijaksanaan pemerintah mengenai proporsi keseimbangan dengan bank-bank komersil.

- g. Atas dasar reserve (R) yang dipegang maka bank-bank menciptakan uang giral yang berupa saldo-saldo rekening Koran yang dimiliki oleh masyarakat umum yang disimpan pada bank-bank (D). jumlah uang beredar (M) mencakup uang kartal yang dipegang masyarakat umum diluar bank (C) dan uang giral yang diciptakan oleh bank-bank umum (D), sehingga :

$$M = C + D$$

- h. Sehingga dari keseluruhan elemen-elemen esensial yang menentukan jumlah uang beredar, maka didapatkan hubungan-hubungan berikut :

$$(1) \quad M = D + C$$

$$(2) \quad B = R + C$$

$$(3) \quad R = r(D + T + G)$$

$$(4) \quad C = kD$$

$$(5) \quad T = tD$$

$$(6) \quad G = gD$$

dengan substitusi (3) dan (4) kedalam (2) diperoleh :

$$(7) \quad B = r(D + T + G) + kD$$

yaitu monetary base atau uang inti (B) dinyatakan merupakan hubungan dengan berbagai deposit

dengan substitusi (5) dan (6) kedalam (7), diperoleh :

$$(8) \quad B = r(D + T + G) + kD$$

yaitu uang inti, dinyatakan dalam pengertian private demand deposit untuk mengurangi jumlah variabel

$$(8') \quad B = [r(1+t+g)+k] * D$$

atau dapat dituliskan sebagai berikut :

$$(9) \quad D = \frac{1}{r(1+t+g)+k} * B$$

oleh karena ingin menemukan $D + C$, maka digunakan (4) dan (9) untuk

meredefinisikan C dalam pengertian uang inti yaitu :

$$(10) \quad C = \frac{1}{r(1+t+g)+k} * B$$

dengan substitusi (9) dan (10) kedalam (1), diperoleh :

$$(11') \quad M = \frac{1+k}{r(1+t+g)+k} * B$$

Akhirnya dapat ditemukan "monetary multiplier" (m) :

$$m = \frac{1+k}{r(1+t+g)+k}$$

dimana : k = currency ratio

t = time deposits

g = government deposits ratio

r = reserve requirement

2. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Sering digunakan untuk indikator tingkat kemakmuran masyarakat sebuah perekonomian, kinerja perekonomian, dari waktu ke waktu, melihat struktur perekonomian suatu negara, membandingkan perekonomian satu dengan perekonomian yang lain, dan sebagainya.

a. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*)

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah menjumlahkan seluruh pendapatan (penghasilan) pelaku ekonomi, dalam suatu negara, pada periode tertentu.

Terdapat empat macam pemilik faktor produksi, yaitu :

1. Pemilik faktor produksi tenaga kerja memiliki pendapatan berupa upah (*wage*).
2. Pemilik faktor produksi tanah memiliki pendapatan berupa sewa (*rent*)
3. Pemilik faktor produksi modal memiliki pendapatan berupa bunga (*interest*)
4. Wiraswastawan (*entrepreneur*) memiliki pendapatan berupa laba (*profit*)

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = Y_w + Y_r + Y_i + Y_p$$

Dimana :

Y adalah pendapatan nasional

Y_w adalah pendapatan berupa upah

Y_r adalah pendapatan berupa sewa

Y_i adalah pendapatan berupa bunga

Y_p adalah pendapatan berupa laba

b. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Perhitungan pendekatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran (belanja) pelaku ekonomi, dalam suatu negara, selama periode tertentu. Dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok rumah tangga perseorang mempunyai pengeluaran dalam bentuk Pengeluaran konsumsi perseorangan dan rumah tangga
2. Kelompok perusahaan mempunyai pengeluaran dalam bentuk pengeluaran investasi domestik bruto
3. Pemerintah mempunyai pengeluaran dalam bentuk konsumsi pemerintah
4. Sektor luar negeri mempunyai penerimaan berupa ekspor dan pengeluaran berupa impor.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, maka pendapatan nasional yang merupakan keseluruhan pengeluaran pelaku-pelaku ekonomi, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana

Y = Pendapatan nasional

C = pengeluaran konsumsi perseorangan dan rumah tangga

I = Pengeluaran investasi domestic bruto

G = pengeluaran konsumsi pemerintah

X = Penerimaan dari ekspor

M = Pengeluaran untuk impor

c. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Perhitungan pendekatan produksi adalah menjumlahkan seluruh nilai produk akhir barang dan jasa (*final goods and services*), dalam suatu negara selama periode tertentu.

Secara matematis pendapatan nasional ini dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \sum_{i=1}^n Q_i P_i$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional

Q_i = Jumlah barang dan jasa

P_i = harga per unit barang dan jasa

3. Tingkat Suku Bunga Deposito

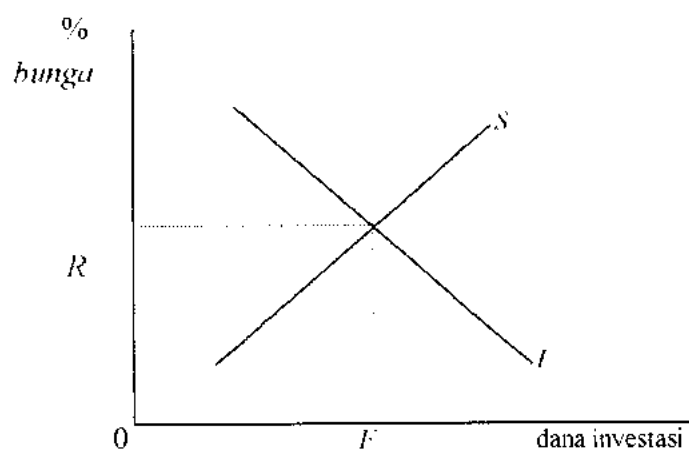
a. Klasik : Loanable Funds

Bunga adalah "harga" dari penggunaan loanable funds. terjemahan langsung dari istilah tersebut adalah "dana yang tersedia untuk dipinjamkan", sebab menurut teori Klasik bunga adalah "harga" yang terjadi di

pasar dana investasi. Selanjutnya para "penabung" dan "investor" ini bertemu di pasar loanable funds, dan dari proses tawar menawar antar mereka akhirnya akan dihasilkan tingkat bunga kesepakatan.

Mengapa kurva penawaran akan dana investasi (S) menaik dan kurva permintaan akan dana investasi menurun? teori Klasik mempunyai jawaban untuk ini sebagai berikut.

GAMBAR 4.4
KURVA PERMINTAAN DANA INVESTASI



Untuk tabungan (penawaran) yang menaik apabila tingkat bunga naik, jawabannya berdasarkan atas perilaku anggota masyarakat yang sejalan dengan perilaku memaksimumkan kepuasan (utility). Semakin tinggi tingkat bunga semakin banyak loanable funds yang ditawarkan dari pasar. dengan demikian kurva penawaran akan loanable funds (kurva S) menaik dari kiri bawah ke kanan atas.

Oleh Fisher diberi nama *rate of time preference* atau "premi" uang harus dibayarkan kepada pemilik dana agar mau meminjamkan uangnya. *Rate of time preference* merupakan ukuran penilaian subyektif dari para pelaku ekonomi mengenai perbedaan antara satu rupiah sekarang dengan satu rupiah nanti. Jadi *rate of time preference* inilah yang akhirnya menentukan bentuk daripada kurva penawaran dan (kurva S). Pada sisi permintaan akan dan (kurva I), satu sumber yang melandasi permintaan akan dana adalah sektor rumah tangga sendiri, yaitu apabila *rate of time preference* pelaku ekonomi tersebut adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk indifferensi tertentu yang pada tingkat bunga berlaku, justru mendorong untuk meminjam karena ingin mengkonsumsi sekarang lebih besar daripada aliran pendapatannya sekarang. Jadi per definisi investor adalah orang yang butuh dana sekarang untuk dibayar kembali nanti apabila proyek investasinya telah menghasilkan.

Dalam teori Klasik, produktifitas dana ini menganut hukum yang berlaku bagi proses produksi, yaitu *law of diminishing return*, menurut hukum ini produktifitas marginal atau *marginal product* dari suatu input akan semakin menurun, apabila input-input lain tetap. Jadi dapat disimpulkan faktor penentu utama dari bentuk kurva S adalah *rate of time preference* para penabung, dan faktor penentu utama dari kurva I adalah *marginal product* dari kapital.

b. Keynesian : *Liquidity Preference*

Teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa orang pada umumnya menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut. teori Keynes khususnya menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, permintaan besar apabila tingkat bunga rendah, dan permintaan kecil apabila tingkat bunga tinggi.

Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa untuk berspekulasi di pasar surat berharga, dimana seseorang perlu memegang uang tunai, dan kegiatan spekulasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan maka orang bersedia membayar harga tertentu untuk pemegangan uang tunai untuk tujuan tersebut.

c. Sintesis Klasik dan Keynesian : IS-LM

Mahzab Klasik menekankan bahwa bunga timbul karena uang adalah "produktif", dalam arti bahwa dengandana di tangan seorang pengusaha bisa menambah alat produksinya (modal) yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Uang bisa meningkatkan produktifitas, dan karena adanya kenaikan produktifitas inilah seseorang mau membayar bunga. Keynesian, uang bisa "produktif" dengan cara lain. Dengan uang tunai di tangan seseorang dapat berspekulasi di pasar surat berharga dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Dan karena adanya keuntungan orang mau membayar bunga. Orang yang menekankan bahwa suatu tingkat bunga dapat dikatakan merupakan tingkat

bunga keseimbangan atau equilibrium interest rate bagi suatu perekonomian apabila tingkat bunga tersebut memenuhi keseimbangan di pasar dana investasi (*loanable Funds*) dan sekaligus keseimbangan di pasar uang adalah Sir John Hicks.

Alat analisisnya adalah kurva IS-LM, Hicks menyatakan bahwa tingkat pendapatan (*marginal propensity to consume*) : tabungan akan naik apabila pendapatan nasional naik. Pendapatan nasional naik apabila investasi naik, dan investasi akan naik apabila tingkat bunga turun.

d. Teori paritas Tingkat Bunga

Adalah salah satu teori yang penting mengenai penentuan tingkat bunga dalam sistem devisa bebas. Teori ini pokoknya menyatakan bahwa :

Dalam sistem devisa bebas tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain, setelah di perhitungkan perkiraan mengenai laju depresiasi mata uang negara yang satu dengan negara yang lainnya.

$$\text{Rumusnya: } R_n \approx R_f + E^*$$

dimana R_n = tingkat bunga (nominal) dalam negeri

R_f = tingkat bunga (nominal) di luar negeri

E^* = Laju depresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang yang diperkirakan akan terjadi.

4.2 Formulasi Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang sifatnya sementara jadi masih harus diuji kebenarannya. Adapun hipotesis yang dapat digunakan adalah :

1. Diduga pendapatan nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar
2. Diduga suku bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar
3. Diduga kebijakan pakto 1988 berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar
4. Diduga pendapatan nasional, tingkat bunga, dan dummy secara bersama berpengaruh terhadap jumlah uang beredar

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Variabel yang digunakan

1. Variabel bebas (*dependent variabel*)

Jumlah uang beredar dalam hal ini adalah uang beredar dalam arti sempit atau M1 yaitu rekening deposito yang dapat dijadikan cek (rekening Koran di bank, certificate deposito) ditambah uang kartal (*currency*) yang dipegang oleh masyarakat.

2. Variabel tak bebas (*independent Variabel*)

- Pendapatan nasional

Adalah semua penjumlahan dari semua barang dan jasa-jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh warga negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Data yang digunakan adalah GDP (*Gross Domestic Product*) berdasarkan harga konstan tahun dasar 1993 (dalam milyar rupiah) untuk kurun waktu 1985-2003, diperoleh dari indikator ekonomi, pendapatan nasional, terbitan BPS (Biro Pusat Statistik), Jakarta Indonesia.

- Suku bunga deposito

Data tentang suku bunga yang dipergunakan adalah suku bunga deposito per 3 bulan yang berlaku khususnya pada bank-bank pemerintah,

karena suku bunga deposito berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.

- Kebijakan pakto 1988

Adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dan pemerintah yang menuntut bank-bank untuk memiliki rasio deposito cadangan minimum. Data yang digunakan berasal dari Bank Indonesia, berupa prosentase cadangan minimum per tahun.

5.2 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia atau laporan mingguan dan bulanan BPS (Biro Pusat Statistik), serta sumber lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

5.3 Metode Analisa Data

1. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa penerbitan sumber data dan studi kepustakaan seperti data yang dibutuhkan antara lain: data jumlah uang beredar, pendapatan nasional, cadangan minimum, dan tingkat bunga. Data tersebut diperoleh dari berita

resmi statistik, laporan bank Indonesia, Pendapatan nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS atau Bank Indonesia.

2. Analisa Data

Metode analisa data menggunakan model persamaan log linear :

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 D + \mu$$

Keterangan :

Y	: Jumlah uang beredar (milyar rupiah)
X1	: Pendapatan nasional (milyar rupiah)
X2	: Suku bunga deposito (persen)
D	: Dummy (Pakto 88 tentang reserve requirement)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Elastisitas
μ	: Variabel gangguan

5.4 Uji t Statistik

Pengujian hipotesis statistik, yang meliputi pengujian hipotesis secara serempak (uji F-Test statistik), pengujian hipotesis secara individu (uji T-Test statistik) serta pengujian ketetapan perkiraan (R^2).

1. Pengujian Parsial (uji T-Test statistik)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T-Test statistik. Tujuan penggunaan uji T-Test statistik adalah untuk menguji parameter secara

parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu, uji T-statistik dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependent. Dalam uji T-statistik ini digunakan hipotesa sebagai berikut :

a. Pengujian terhadap koefisien variabel pendapatan nasional

Ho : $\beta_1 = 0$ (maka variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen)

Ha : $\beta_1 > 0$ (maka variabel independent berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen)

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima (sisi positif). Dengan tingkat signifikansi 5% secara individu variabel pendapatan nasional (X1) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia (Y).

b. Pengujian terhadap koefisien variabel suku bunga deposito

Ho : $\beta_2 = 0$ (maka variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen)

Ha : $\beta_2 < 0$ (maka variabel independent berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel dependen)

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima (sisi negatif). Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% secara individu variabel

tingkat bunga (X2) berpengaruh secara signifikansi dan negatif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia (Y).

c. Pengujian terhadap koefisien variabel dummy

$H_0 : \beta_3 = 0$ (maka variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen)

$H_a : \beta_3 > 0$ (maka variabel independent berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen)

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% secara individu variabel dummy (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia (Y).

Nilai t-hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{Se\beta_i}$$

2. Pengujian Secara Serempak (Uji F- Test Statistik)

Uji F-test statistik dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara serempak atau gabungan, dilakukan pengujian hipotesa secara serentak dengan menggunakan uji F.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

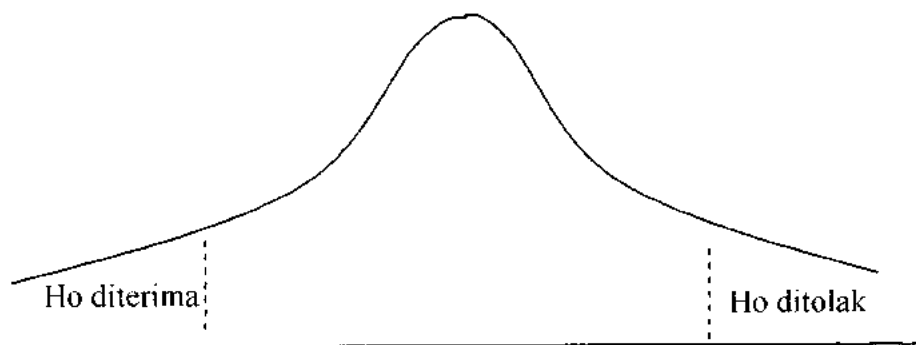
Pengambilan keputusan :

- Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

F - hitung diperoleh dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Kurva Distribusi F



3. Pengujian Ketetapan Perkiraan (uji R^2)

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. R^2 mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi data (variabel independent) yang dijelaskan oleh model regresi. Semakin tinggi nilai R^2 , maka garis regresi sampel semakin baik. Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 , yang terletak pada $0 < R^2 < 1$.

Nilai R^2 diperoleh dari :

$$\begin{aligned} R^2 &= \frac{\text{Jumlah kuadrat regresi}}{\text{Total jumlah kuadrat}} = \frac{\text{ESS}}{\text{TSS}} \\ &= \frac{\text{TSS} - \text{RSS}}{\text{TSS}} = 1 - \frac{\text{RSS}}{\text{TSS}} \\ &= 1 - \frac{\sum e^2}{\sum y^2} \end{aligned}$$

5.5 Uji Asumsi Klasik

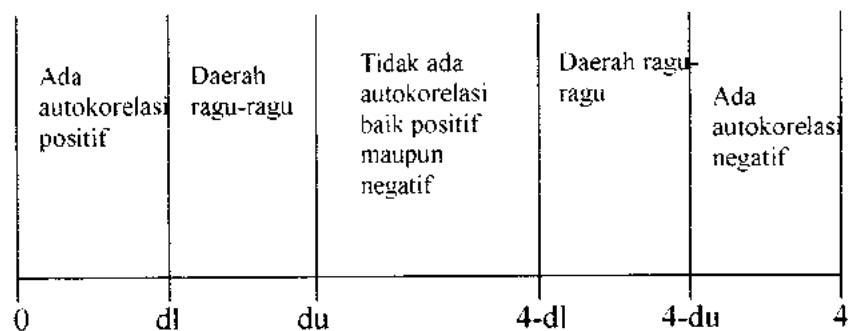
1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara residual satu observasi dengan observasi lain yang disusun menurut urutan waktu (*time series*) maupun menurut urutan ruang atau tempat (*cross section*).

Untuk menguji apakah hasil estimasi suatu model regresi tidak mengandung korelasi serial diantara *disturbance term*-nya, maka digunakan D-W Statistik :

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

- Jika $d < d_l$ atau $d_u > (4 - d_l)$ maka H_0 ditolak, dengan pilihan pada alternatif yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika d terletak antara d_u dan $(4 - d_u)$ maka H_0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika d terletak antara d_l dan d_u atau diantara $(4 - d_u)$ dan $(4 - d_l)$, maka uji DW tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk nilai-nilai ini tidak dapat (pada suatu tingkat signifikan tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.



2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah faktor - faktor pengganggu mempunyai varian residual yang sama atau tidak. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, antara lain salah satunya dengan Uji White. Pada pengujian White, setelah memperoleh nilai residual e dari regresi OLS, dilakukan regresi terhadap nilai dari e^2 , Bentuk fungsional yang digunakan oleh White dalam percobaan salah satunya adalah:

$$e^2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1^2 + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_2^2 + \beta_5 D + v$$

Dimana : v = unsur kesalahan

Jika nilai $R^2 \times \text{Observasi} < \text{nilai Chi Square } \chi^2 \text{ tabel pada DF} = 5$, maka model yang diuji tidak terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya.

3. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat korelasi antar variabel independen.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan metode regresi/korelasi partial yang dikemukakan Farrar & Glauber yaitu dengan

cara melakukan regresi setiap variabel bebas dengan variabel bebas sisanya.

Persamaan regresi induk atau model yang diuji :

$$DLY = \beta_0 + \beta_1 DLX_1 + \beta_2 DLX_2 + \beta_3 Dm + e \rightarrow \text{Diperoleh } R_m^2 \text{ (} R^2 \text{ Induk)}$$

Persamaan regresi parsial

$$DLX_1 = \beta_0 + \beta_1 DLX_2 + \beta_2 Dm + e \rightarrow \text{Diperoleh } R_{v1}^2 \text{ (} R^2 \text{ parsial } DLX_1)$$

$$DLX_2 = \beta_0 + \beta_1 DLX_1 + \beta_2 Dm + e \rightarrow \text{Diperoleh } R_{v2}^2 \text{ (} R^2 \text{ parsial } DLX_2)$$

$$Dm = \beta_0 + \beta_1 DLX_1 + \beta_2 DLX_2 + e \rightarrow \text{Diperoleh } R_{dm}^2 \text{ (} R^2 \text{ parsial } Dm)$$

Kriteria pengujiannya jika R_j^2 regresi partial $<$ R^2 regresi model yang diuji,
maka variabel bebas tersebut tidak terkena gangguan heteroskedastisitas.